

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

(Studi Kasus Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Sandubaya Kota Mataram)

Siti Halifa^{1*}, Muhammad Ali², Yudhi Lestanata³

¹² Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³ Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

*Corresponding Author Email: lifasaini@gmail.com

Received: 1 July 2026; Revised: 8 July 2026; Accepted: 22 July 2026

Abstract

Urban waste management is an increasingly complex environmental issue that requires collaboration among various stakeholders. Collaborative governance is important because waste management cannot be handled solely by the government but requires cooperation between the government, TPST managers, communities, and related actors. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in urban waste management at TPST Sandubaya, Mataram City, and identify supporting and inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that collaborative governance at TPST Sandubaya has been implemented through dialogue, trust-building, commitment, shared understanding, and improved coordination among actors. Supporting factors include institutional aspects, actor capacity, community participation, and communication. However, challenges remain, particularly limited resources and community participation. Strengthening coordination, infrastructure, and public awareness is needed to achieve sustainable waste management.

Keywords: *Collaborative Governance, Urban Waste Management, Integrated Waste Processing Facility (TPST)*

Introduction

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat meningkatnya aktivitas manusia dan pola konsumsi masyarakat .(Lingga, Yuana, Sari, Syahida, & Shahron, 2024). Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta efektivitas implementasi kebijakan (Latidi et al., 2026). Oleh karena itu, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang terpadu dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun komunitas lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar pengelolaan sampah, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hingga kebijakan daerah seperti Program Zero Waste Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya serta mendorong keterlibatan berbagai aktor dalam pengelolaan sampah (Nyoman & Yanti, 2026).

Dalam perspektif collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007), pengelolaan sampah membutuhkan proses kolaborasi melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman antaraktor (Ansell & Gash, 2007). Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Permasalahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara mandiri (Persampahan, Kabupaten, Rizky, & Saputra, 2024).

Kota Mataram menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram tahun 2025, timbulan sampah mencapai sekitar 311,92 ton per hari dengan komposisi terbesar berupa sampah organik sebesar 60 persen dan sampah plastik sebesar 30 persen. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Mataram mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya sebagai salah satu strategi dalam mendukung sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste. TPST Sandubaya berperan dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna seperti kompos, pakan maggot, dan paving block dari sampah plastik.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di TPST Sandubaya menunjukkan adanya keterlibatan berbagai aktor, yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator dan fasilitator, pengelola TPST sebagai pelaksana operasional, serta masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam pengurangan sampah dari sumbernya. Meskipun demikian, implementasi kolaborasi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya, kendala fasilitas pengolahan, serta partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya optimal.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya Kota Mataram. Penelitian ini berfokus pada proses kolaborasi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah, meliputi pemerintah, pengelola TPST, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan berbasis konsep *Zero Waste*. Penelitian dilaksanakan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya yang berada di Kota Mataram sebagai lokasi utama pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu Kepala Bidang atau pejabat terkait pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, pengelola TPST Sandubaya, petugas operasional pengelolaan sampah, pengelola bank sampah, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang berada di wilayah pelayanan TPST Sandubaya. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan sampah perkotaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, data operasional TPST Sandubaya, laporan pengelolaan sampah, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil penelitian sesuai dengan fokus kajian *collaborative governance*. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun matriks agar memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Results and Discussion

Bentuk *Collaborative Governance* Dalam pengelolaan sampah di TPST Sandubaya

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Sandubaya diwujudkan melalui kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, pengelola TPST Sandubaya, pemerintah kelurahan, petugas kebersihan, bank sampah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pembagian peran dan tanggung jawab, koordinasi secara berkala, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamarudin selaku Kepala TPST Sandubaya, bentuk kolaborasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada operasional pengelolaan sampah, tetapi juga membangun koordinasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara optimal

“Dalam pengelolaan sampah kami tidak dapat bekerja sendiri. Dinas Lingkungan Hidup memberikan arahan dan dukungan kebijakan, sementara pemerintah kelurahan membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting melalui pemilahan sampah dari rumah tangga dan keterlibatan dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Dengan adanya kerja sama tersebut, pengelolaan sampah menjadi lebih efektif karena setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing” (Wawancara, 24 april 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa bentuk *collaborative governance* di TPST Sandubaya diwujudkan melalui sinergi antaraktor yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai regulator, pembina, dan pengawas pelaksanaan pengelolaan sampah. Pengelola TPST bertanggung jawab terhadap operasional pengolahan sampah, sedangkan pemerintah kelurahan berperan dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat berpartisipasi dengan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya serta mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan secara rutin.

Selain pembagian peran, bentuk kolaborasi juga terlihat melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkala antara Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPST, serta pihak-pihak terkait untuk membahas berbagai kendala dan mencari solusi bersama dalam pengelolaan sampah.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Wibisana selaku fungsional dampak lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram sebagai berikut.

“Kami secara rutin melakukan koordinasi dengan pengelola TPST, pemerintah kelurahan, dan kelompok masyarakat. Setiap permasalahan yang muncul di lapangan dibahas bersama agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Selain itu, kami juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan penerapan konsep *Zero Waste*” (Wawancara, 27 april 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bentuk *collaborative governance* tidak hanya berupa kerja sama formal antarinstansi, tetapi juga diwujudkan melalui komunikasi yang intensif, koordinasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah. Kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antaraktor sehingga tercipta kesamaan tujuan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Sandubaya telah berjalan melalui keterlibatan berbagai aktor yang saling bekerja sama sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai pembuat kebijakan, koordinator, dan pengawas, sedangkan pengelola TPST melaksanakan kegiatan operasional pengolahan sampah. Pemerintah kelurahan membantu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana pemilahan sampah dari sumbernya dan berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang dibangun melalui koordinasi, komunikasi, saling mendukung, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah perkotaan. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi media untuk membangun kesepahaman (*shared understanding*) sekaligus meningkatkan kepercayaan (*trust building*) antaraktor yang terlibat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007), yang menyatakan bahwa kolaborasi yang efektif dibangun melalui dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), dan pemahaman bersama (*shared understanding*). Dalam konteks TPST Sandubaya, seluruh unsur tersebut tercermin melalui koordinasi yang berkesinambungan, pembagian peran yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Berdasarkan data yang dihasilkan dari dinas lingkungan hidup Kondisi Persampahan Kota Mataram 2025

No	Keterangan	Tahun	
		M3/Tahun	Ton/Tahun
1.	Jumlah Pengurangan Sampah	95.421,669	32.492,30
2.	Jumlah Penanganan Sampah	225.038,706	73.270,20
3.	Sampah yang ditangani/dikelola	323.490,375	106.762,50
4.	Sampah yang tidak dikelola	21.480,730	7.089,35
5.	Jumlah sampah yang didaur ulang	96.963,939	32.001,30
6.	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1.487,73	491
7.	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	221.890,58	73.223,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, jumlah sampah yang berhasil dikelola mencapai **323.490,375 m³/tahun** atau **106.762,50 ton/tahun**, yang terdiri atas pengurangan sampah sebesar **32.492,30 ton/tahun** dan penanganan sampah sebesar **73.270,20 ton/tahun**. Selain itu, sampah yang berhasil didaur ulang mencapai **32.001,30 ton/tahun**, sedangkan sampah yang dimanfaatkan kembali sebesar **491 ton/tahun**. Meskipun demikian, masih terdapat **7.089,35 ton/tahun** sampah yang belum dikelola, sementara **73.223,89 ton/tahun** sampah masih diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Mataram telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPST Sandubaya, masyarakat, dan pemangku

kepentingan lainnya untuk meningkatkan pengurangan sampah dari sumber, mengoptimalkan kegiatan daur ulang, serta mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di TPST Sandubaya Kota Mataram dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan *collaborative governance*. Adanya pembagian tugas yang jelas antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, pengelola TPST Sandubaya, pemerintah kelurahan, dan kelompok masyarakat mempermudah pelaksanaan pengelolaan sampah. Selain itu, keberadaan regulasi daerah mengenai pengelolaan sampah memberikan dasar hukum bagi setiap aktor dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wibisana selaku fungsional dampak lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menyampaikan:

"Setiap pihak sudah memiliki tugas masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup bertugas menyusun kebijakan dan melakukan pengawasan, sedangkan TPST bertanggung jawab terhadap proses pengolahan sampah. Pemerintah kelurahan juga membantu dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan tugas masing-masing." (Wawancara, 27 april 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian tugas dan kewenangan yang jelas menjadi dasar dalam membangun kolaborasi antarlembaga. Kejelasan peran tersebut mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan sekaligus mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala TPST Sandubaya, Bapak Kamarudin, sebagai berikut.

Kami bekerja berdasarkan tugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Setiap hari kami menerima sampah dari berbagai wilayah, kemudian melakukan pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, pemanfaatan sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis, hingga pengurangan volume sampah yang akan dibawa ke TPA. Jika terdapat kendala operasional, kami langsung berkoordinasi dengan DLH sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan cepat. Selama ini hubungan kerja sama antarinstansi berjalan cukup baik." (Wawancara, 24 april 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat merasakan adanya pembagian peran yang cukup jelas antara pemerintah, pengelola TPST, dan aparat kelurahan. Hal

tersebut memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait pelayanan persampahan, sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik.

Faktor kelembagaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Sandubaya. Kejelasan struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta dukungan regulasi mampu menciptakan koordinasi yang efektif antarpemangku kepentingan. Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas, sedangkan TPST Sandubaya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan sampah. Pemerintah kelurahan mendukung proses sosialisasi kepada masyarakat, sementara masyarakat berpartisipasi melalui pemilahan sampah dan penyampaian informasi mengenai kondisi lingkungan.

Selain itu, keberadaan mekanisme koordinasi yang jelas mempermudah setiap aktor dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Pembagian tugas yang terstruktur juga mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan sehingga setiap lembaga dapat bekerja secara lebih efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

2. Faktor Kapasitas Aktor

kapasitas aktor sangat memengaruhi keberhasilan kolaborasi. Kompetensi petugas, pengalaman pengelola TPST, serta kemampuan pemerintah dalam memberikan pembinaan menjadi modal utama dalam menjalankan pengelolaan sampah secara efektif. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan sarana pendukung yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kamarudi selaku Kepala TPST Sandubaya mengatakan bahwa

“Petugas sudah memahami proses pemilahan dan pengolahan sampah, tetapi jumlah tenaga yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan volume sampah yang masuk setiap hari. Selain itu, kami juga masih membutuhkan tambahan alat dan kendaraan operasional agar pekerjaan lebih maksimal.” (Wawancara, 24 april 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa petugas TPST telah memiliki kemampuan teknis dalam melakukan pemilahan, pengolahan, dan pengurangan sampah. Namun demikian, keterbatasan jumlah tenaga kerja serta sarana operasional masih menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi lebih tinggi, terutama ketika volume sampah yang masuk mengalami peningkatan.

kapasitas aktor tidak hanya ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga oleh dukungan fasilitas kerja yang memadai. Meskipun petugas memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, keterbatasan armada pengangkut, alat pengolahan, dan jumlah personel menyebabkan proses pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penambahan tenaga kerja, serta penyediaan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang penting dalam mendukung keberhasilan *collaborative governance*. Temuan ini sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2007) yang menegaskan bahwa kapasitas setiap aktor memengaruhi efektivitas kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan *collaborative governance*. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penghasil sampah, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pemilahan sampah dari sumber, mengikuti kegiatan gotong royong, serta mendukung keberadaan bank sampah. Tingkat partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan program pengurangan sampah yang dilaksanakan di TPST Sandubaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga di sekitar TPST Sandubaya, yaitu Ibu Rayhan, sebagai berikut.

"Kami sudah mulai memilah sampah organik dan anorganik di rumah karena sering mendapatkan sosialisasi dari petugas. Namun, masih ada sebagian warga yang belum terbiasa melakukan pemilahan sehingga perlu diberikan edukasi secara terus-menerus." (Wawancara, 24 April 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, belum seluruh masyarakat memiliki kebiasaan memilah sampah sehingga partisipasi yang diberikan masih belum merata di setiap lingkungan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah, mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan, dan mendukung program bank sampah, maka semakin besar pula keberhasilan pemerintah dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST maupun TPA. Sebaliknya, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam implementasi *collaborative governance*, karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah.

4. Faktor Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi merupakan faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Sandubaya. Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, komunikasi langsung, serta penyampaian informasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPST, pemerintah kelurahan, dan masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wibisana selaku fungsional dampak lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menyampaikan:

"Kami rutin mengadakan rapat koordinasi dengan pengelola TPST dan pihak kelurahan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Apabila terdapat kendala di lapangan, kami segera berkoordinasi agar dapat ditemukan solusi bersama sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik." (Wawancara, 27 april 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang dilakukan secara berkala telah memperkuat hubungan kerja sama antaraktor dalam pengelolaan sampah. Melalui koordinasi tersebut, setiap kendala operasional dapat dibahas bersama sehingga keputusan yang diambil lebih cepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Koordinasi dan komunikasi yang efektif menjadi fondasi dalam membangun hubungan kolaboratif antarpemangku kepentingan. Rapat koordinasi, forum diskusi, serta komunikasi langsung memberikan ruang bagi setiap aktor untuk menyampaikan permasalahan, memberikan masukan, dan menyepakati solusi bersama. Kondisi ini mencerminkan adanya hubungan yang saling mendukung dan meningkatkan kepercayaan (*trust building*) antaraktor. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat pertukaran informasi, memperlambat pengambilan keputusan, dan mengurangi efektivitas pengelolaan sampah. Temuan ini sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) yang menekankan bahwa dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) dan komunikasi yang berkelanjutan merupakan unsur utama dalam membangun *collaborative governance* yang efektif.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya Kota Mataram telah berlangsung secara cukup efektif melalui sinergi antarpemangku kepentingan, yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPST, pemerintah kelurahan, bank sampah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut tercermin dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional, pelaksanaan koordinasi yang berkesinambungan, komunikasi yang terbuka, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa unsur-unsur utama *collaborative governance*, seperti dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan kesamaan pemahaman, telah diterapkan sehingga mampu mendukung terciptanya pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Keberhasilan implementasi *collaborative governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu aspek kelembagaan, kapasitas aktor, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan sejumlah kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumber. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada TPST Sandubaya dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan implementasi *collaborative governance* pada wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya penguatan kolaborasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif agar dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah perkotaan serta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan.

References

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Gogik, B., Rahmawati, A. F., & Syamsu, F. D. (2021). Analisis pengelolaan sampah berkelanjutan pada wilayah perkotaan di indonesia, 8(1), 1–12.
- Latidi, M. S., Abdussamad, Z., Tohopi, R., Studi, P., Publik, A., & Gorontalo, U. N. (2026). Implementation of Waste Management Policy in Limboto District Gorontalo Regency, 12(01), 1–12.
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., & Shahron, C. S. (2024). Sampah di Indonesia : Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif, 4, 12235–12247.
- Mariana, S. D. (2021). KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Community Engagement-Based Waste Management in Menteng Subdistrict Jekan Raya Palangka Raya City , Central Kalimantan Province Nyoman, N., & Yanti, K. (2026). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI INDONESIA : STUDI LITERATUR TENTANG EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN, 18(1), 100–119.
- Pembangunan, J. (2021). CHALLENGES OF STAKEHOLDERS PARTICIPATION IN THE SUSTAINABLE URBAN, 17(4), 385–397. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34438>
- Persampahan, P., Kabupaten, D., Rizky, S. A., & Saputra, A. P. (2024). Model Collaborative Governance, 24(1), 12–29.
- Rani, B. M. (2024). Peran Kebijakan Publik dalam Mendorong Inovasi Teknologi : Perspektif Pelaku Industri dan Pemerintah, 4, 70–83.
- Sari, I., Maulana, M. A., & Nurfaishal, M. D. (2021). Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(2), 1–12.